

**PENGGUNAAN ISTILAH ‘WISATA ALAM’ DAN ‘EKOWISATA’ DI INDONESIA:  
SEBUAH TELAHAH SINGKAT**

***(THE USE OF THE TERMS ‘NATURE TOURISM’ AND ‘ECOTOURISM’ IN  
INDONESIA: A BRIEF REVIEW)***

**Musadad<sup>1\*</sup>, Nurlena<sup>2</sup>, Amad Saeroji<sup>3</sup>**

Prodi Usaha Perjalanan Wisata, Universitas Riau<sup>1</sup>

Prodi Perhotelan, Universitas Telkom<sup>2</sup>

Prodi Usaha Perjalanan Wisata, Universitas Sebelas Maret<sup>3</sup>

\*[musadad@lecturer.unri.ac.id](mailto:musadad@lecturer.unri.ac.id)

***Abstract***

*This paper discusses the use of the term 'ecotourism' in the naming of various nature-based tourist destinations in Indonesia and points out two factors that are vital in ecotourism planning, development, and operation but tend to be overlooked, i.e., visitor limitation and local community involvement. Various parties including managers of nature-based tourism destinations and local governments need to be given an understanding of what nature tourism and ecotourism are since the two concepts are different and not all nature tourism can be said to be ecotourism. They also need to be educated about the importance of limiting the number of visitors as well as involving local communities in ecotourism destinations. These two factors are very important to maintain the sustainability of ecotourism destinations.*

***Keywords:*** *Ecotourism, Visitor Limitation, Community Participation.*

***Abstrak***

Tulisan ini mendiskusikan penggunaan istilah ‘ekowisata’ pada penamaan berbagai destinasi wisata berbasis alam di Indonesia serta menunjukkan dua faktor yang sangat penting dalam perencanaan, pengembangan, dan operasional ekowisata namun cenderung terabaikan, yaitu pembatasan pengunjung dan keterlibatan masyarakat lokal. Berbagai pihak termasuk pengelola dan pemerintah lokal perlu diberi pemahaman mengenai apa itu wisata alam dan ekowisata mengingat kedua konsep tersebut berbeda dan tidak semua wisata alam dapat dikatakan ekowisata. Mereka juga perlu diedukasi mengenai pentingnya pembatasan pengunjung dan keterlibatan masyarakat lokal pada destinasi-destinasi ekowisata. Kedua faktor ini sangat penting untuk mempertahankan kelestarian destinasi ekowisata.

**Kata Kunci:** Ekowisata, Pembatasan Pengunjung, Partisipasi Masyarakat.

## PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, terdapat sebuah istilah dalam dunia pariwisata yang semakin populer di Indonesia. Istilah tersebut adalah ekowisata, atau dalam Bahasa Inggris disebut *Ecotourism*. Banyak destinasi wisata berbasis alam yang memakai nama 'ekowisata'. Berbagai destinasi wisata berbasis alam tersebut meliputi hutan bakau (*mangrove*), taman kota, hutan pinus, dan lain-lain. Sangat mudah untuk menemukan nama "ekowisata" yang disematkan pada tempat-tempat wisata berbasis alam tersebut baik di dunia maya (internet) maupun di dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomena seperti ini sebenarnya menunjukkan bahwa pariwisata di Indonesia sedang berkembang. Penggunaan nama 'ekowisata' tersebut membuktikan bahwa para pengelola wisata berbasis alam semakin kreatif dalam mem-*branding* produk wisata mereka. Motif penamaan wisata berbasis alam dengan 'ekowisata' juga akan memberikan kesan yang menarik perhatian publik karena nama wisata alam cenderung dirasa terlalu *mainstream*. Namun demikian, perlu ditelaah lebih lanjut mengenai penamaan 'ekowisata' tersebut, apakah sudah sesuai atau belum untuk diterapkan.

Selain itu, dari pengamatan penulis berkunjung ke beberapa destinasi wisata alam dengan nama 'ekowisata', terkadang destinasi-destinasi tersebut kurang memperhatikan prinsip ekowisata itu sendiri yaitu pembatasan pengunjung dan partisipasi masyarakat lokal. Kedua faktor ini mutlak harus diterapkan pada sebuah destinasi ekowisata demi keberlanjutan ekowisata itu sendiri dari aspek lingkungan/ekologis, ekonomi, maupun sosialnya.

Dengan mengacu pada fenomena di atas, tulisan ini akan menjawab pertanyaan: apa perbedaan wisata alam dan ekowisata, serta apa pentingnya pembatasan pengunjung dan partisipasi masyarakat bagi keberlangsungan ekowisata?

## WISATA ALAM VS EKOWISATA

Aktivitas bepergian ke alam seperti ke hutan belantara untuk mendapatkan pengalaman berbeda sudah ada setidaknya sejak *Romantic Era* (Fennell, 2003). Bahkan selama abad kesembilan belas banyak orang bepergian baik di Eropa maupun Amerika Utara dengan tujuan utama menikmati alam bebas.

Terkait dengan penggunaan istilah *ecotourism* di era modern, Thompson (1995) mengatakan Ceballos-Lascuráin adalah orang pertama yang menciptakan kata *ecotourism* pada tahun 1980an. Dia menggunakan kata itu untuk menggambarkan perjalanan ke area-area yang masih asri (*undisturbed areas*) untuk menikmati keindahan alam dan budayanya. Pada tahun 1981, Ceballos-Lascuráin menjadi presiden pendiri Asosiasi Meksiko untuk Konservasi Alam, sebuah LSM di Meksiko yang paling berpengaruh dalam bidang konservasi. Pada 1984, ia mendirikan agensi ekowisata Meksiko pertama, ECOTOURS.

Hetzer (1965) mengatakan bahwa kemunculan ekowisata merupakan respon atas puncak ketidakpuasan terhadap pendekatan negatif yang dilakukan pemerintah dan masyarakat terhadap pembangunan, terutama dari sudut pandang ekologis. Nelson (1994) menambahkan selama akhir tahun 1960-an sampai awal tahun 1970-an para peneliti prihatin atas penggunaan sumber daya alam yang tidak tepat di mana pemerintah dan industri terlalu berlebihan dan eksploitatif dalam kebijakan pembangunan mereka. Oleh karena itu, Fennell (2003) menyimpulkan bahwa ekowisata berkembang sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap bentuk-bentuk pariwisata konvensional yang, dalam arti umum, mengabaikan unsur sosial dan ekologis.

Berdasarkan pengamatan penulis, bagi masyarakat awam, terkadang ekowisata dan wisata alam dianggap sama. Ada semacam tren di masyarakat bahwa untuk menamai suatu objek wisata berbasis alam dengan ekowisata. Fenomena semacam ini jamak ditemui di Indonesia. Mulai dari wisata taman hingga wisata hutan bakau (*mangrove*) dinamai ekowisata. Tidak mengherankan sebenarnya karena ketika suatu destinasi wisata berbasis alam dinamai 'ekowisata' akan memberikan kesan lebih berkelas atau spesial pada destinasi tersebut. Secara *branding* juga mungkin lebih menjual daripada nama 'wisata alam'. Ketidaktepatan penamaan ini bisa jadi disengaja atau tidak disengaja akibat ketidakpahaman akan konsep ekowisata itu sendiri. Padahal wisata alam dan ekowisata jelas berbeda, baik secara definisi maupun secara prinsip. Oleh karenanya, masyarakat, bahkan mungkin pihak dinas pariwisata di daerah-daerah, perlu diedukasi mengenai hal ini.

Secara eksplisit, Goodwin (1995) membedakan istilah wisata alam dan ekowisata. Dia menulis sebagai berikut:

“Wisata alam” mencakup semua bentuk pariwisata, termasuk pariwisata massal, wisata petualangan, pariwisata berdampak rendah, ekowisata, yang memanfaatkan sumber daya alam liar atau belum berkembang termasuk spesies, habitat, lanskap, pemandangan, serta perairan laut dan tawar. Wisata alam adalah perjalanan untuk menikmati kawasan alam yang belum berkembang atau satwa liar.

Sebaliknya,

“Ekowisata” adalah wisata alam berdampak rendah yang bermanfaat bagi pelestarian spesies dan habitat baik secara langsung melalui kontribusi terhadap konservasi dan/atau secara tidak langsung dengan memberikan pendapatan yang cukup kepada masyarakat lokal sehingga mereka dapat menghargai dan melindungi kawasan satwa liar mereka sebagai sumber penghasilan.

Dari kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa wisata alam dapat berupa *mass tourism* (wisata massal) artinya tidak ada pembatasan jumlah pengunjung. Ketika tidak ada pembatasan jumlah pengunjung, maka suatu destinasi berbasis alam sangat rentan mengalami kerusakan atau degradasi kualitas lingkungan. Sebaliknya, ekowisata menekankan adanya konservasi atau perlindungan pada lingkungan alam sehingga mau tidak mau jumlah wisatawan harus dibatasi. Hal lain yang membedakan wisata alam dan ekowisata adalah bahwa ekowisata harus berkontribusi pada masyarakat lokal di mana salah satu bentuk yang paling nyata adalah pemberdayaan masyarakat. Salah satu contohnya adalah pelibatan mereka dalam kegiatan wisata. Artinya mereka tidak hanya menjadi penonton tapi juga menjadi *stakeholder* yang diperhitungkan ide dan tenaganya dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan pariwisata.

Ekowisata juga banyak didefinisikan oleh para ahli atau organisasi. Sebagai contoh, The

*Ecotourism Society* (1993) memberikan pengertian tentang ekowisata yaitu “perjalanan (*travel*) bertanggungjawab menuju area alami untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat lokal. Di sisi lain, Preece *et al.* (1995) memberi definisi ekowisata sebagai “pariwisata berbasis alam yang menyelenggarakan interpretasi dan edukasi lingkungan serta dikelola secara berkelanjutan secara ekologis”.

Dari sinilah muncul seperangkat prinsip (*principles*) yang dapat dijadikan basis atau tolok ukur suatu destinasi wisata berbasis alam dapat dikatakan ekowisata atau bukan. Dalam berbagai literatur banyak ditemukan sejumlah prinsip ekowisata yang diungkapkan oleh para ahli maupun organisasi. UNEP/WTO 2002 dalam Fennell (2003) memberi lima kriteria yang dapat digunakan untuk mendefinisikan ekowisata, yaitu: *minimal impact management, contribution to conservation, nature-based product, contribution to community*, dan *environmental education*.

Wallace dan Pierce dalam Fennell (2003) menyatakan bahwa sebuah wisata dapat dikatakan sebagai ekowisata sejati (*true ecotourism*) jika melaksanakan enam prinsip berikut:

1. meminimalisir efek negatif pada lingkungan dan masyarakat setempat.
2. meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang sistem alam dan budaya suatu area serta keterlibatan pengunjung dalam isu-isu yang mempengaruhi sistem tersebut.
3. berkontribusi pada konservasi dan pengelolaan alam.
4. memaksimalkan partisipasi awal dan jangka panjang masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan jenis dan aktivitas wisata.
5. mengarahkan manfaat ekonomi dan manfaat lainnya kepada masyarakat lokal daripada mengganggu atau menggantikan praktik-praktik tradisional (pertanian, perikanan, sistem sosial, dll).
6. memberikan peluang khusus bagi masyarakat lokal dan orang-orang yang bekerja di wisata alam untuk mengunjungi dan mempelajari lebih lanjut tentang atraksi-atraksi yang ingin dikunjungi oleh pengunjung.

Sementara itu, *The International Ecotourism Society* (2015) memberikan prinsip-prinsip ekowisata sebagai berikut:

1. Meminimalkan dampak fisik, sosial, perilaku, dan psikologis.
2. Membangun kesadaran terhadap lingkungan maupun budaya, serta rasa hormat.
3. Memberikan pengalaman positif bagi pengunjung dan masyarakat lokal.
4. Menghasilkan manfaat finansial langsung untuk konservasi.
5. Menghasilkan keuntungan finansial baik bagi masyarakat lokal maupun industri swasta.
6. Memberikan pengalaman interpretatif yang mengesankan kepada pengunjung yang membantu meningkatkan sensitivitas terhadap iklim politik, lingkungan, dan sosial dari negara yang dikunjungi.
7. Merancang, membangun, dan mengoperasikan fasilitas-fasilitas berdampak rendah.
8. Mengenali hak dan kepercayaan spiritual Penduduk Asli (*Indigenous People*) dan bekerja sama dengan mereka dalam menciptakan pemberdayaan.

Kesimpulannya, prinsip-prinsip ekowisata membahas tiga faktor utama, meliputi aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Ketiga faktor tersebut harus diperhatikan secara seksama untuk mencapai sebuah pariwisata yang berkelanjutan.

Berbagai macam pengertian dan prinsip dalam ekowisata melahirkan berbagai perspektif pula dalam memandang apa itu ekowisata. Perspektif ini dirangkum oleh Damanik dan Weber (2006) yang mengatakan terdapat tiga perspektif dalam ekowisata, yaitu:

1. *Ecotourism as product* yang artinya seluruh daya tarik yang berdasarkan atas sumber daya alam.
2. *Ecotourism as market* yang artinya perjalanan (*travel*) ditujukan untuk usaha-usaha pelestarian ekologis.
3. *Ecotourism as development approach* yang artinya cara mengelola serta memanfaatkan *tourism resources* dengan cara yang ramah terhadap lingkungan.

Ketika mengacu pada berbagai macam prinsip dan perspektif dalam ekowisata, maka

sebuah pengembangan ekowisata memerlukan berbagai macam penanganan agar potensi yang ada dapat digarap secara maksimal. Berbagai aspek seperti alam, budaya, dan buatan harus dikombinasikan untuk dapat menarik wisatawan.

Dari definisi-definisi dan prinsip-prinsip ekowisata dan wisata alam di atas, Terdapat dua hal yang secara praktikal sangat membedakan keduanya, yaitu ekowisata mensyaratkan pembatasan pengunjung dan pelibatan masyarakat lokal sementara wisata alam tidak mensyaratkan keduanya.

#### **PEMBATASAN JUMLAH PENGUNJUNG**

Sudah semestinya sebuah destinasi ekowisata mempunyai aturan pembatasan pengunjung. Hal ini karena jumlah pengunjung yang tidak terkendali dikhawatirkan dapat merusak lingkungan alam itu sendiri. Mulai dari pembuangan sampah yang tidak teratur, rusaknya tumbuhan, atau terusiknya kehidupan hewan rawan terjadi jika pengunjung tidak dibatasi. Pembatasan jumlah pengunjung ini mutlak harus dilakukan karena memang itu lah salah satu praktik nyata dari prinsip ekowisata yang membedakannya dengan wisata alam biasa. Selain itu, suatu destinasi berbasis alam pasti mempunyai daya dukung (*carrying capacity*) yang harus dipatuhi agar alam tetap terjaga dan terlindungi dari aktivitas wisata. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah kerusakan lingkungan seperti yang terjadi di Goa Pindul, Gunungkidul di mana selain merusak stalaktit atau stalagmit, pariwisata telah menghilangkan hampir 75% hewan yang hidup di gua seperti kelelawar dan ikan (Musadad, 2016).

Membatasi jumlah pengunjung juga bermanfaat untuk meredam gejolak yang ada di masyarakat sebagaimana yang terjadi Flores dalam isu pembangunan infrastruktur pariwisata yang masif di Pulau Komodo atau yang terjadi di Bali dengan kasus Teluk Benoanya di mana masyarakat menginginkan agar lokasi tersebut tetap menjadi daerah konservasi sebagaimana dilaporkan oleh Darmawan (2019).

Lalu yang menjadi pertanyaan adalah kalau jumlah pengunjung dibatasi lalu bagaimana dengan pendapatan yang didapatkan karena

salah satu prinsip ekowisata adalah menghasilkan pendapatan untuk berkontribusi secara ekonomi kepada masyarakat lokal dan berkontribusi bagi pembiayaan konservasi alam. Jawabannya sebenarnya mudah yaitu dengan menaikkan biaya masuk bagi pengunjung.

Kebijakan pembatasan pengunjung dengan menaikkan biaya masuk ini terbukti justru menghasilkan lebih banyak manfaat secara ekonomi. Sebagai contoh, operator wisata Rivers Fiji di Viti Levu, Fiji membatasi jumlah pengunjung hanya 36 per hari, namun penghasilan tiap tahun mencapai 164,530 USD (Buckley, 2003). Di Gunung Purba Nglanggeran Yogyakarta, dengan menaikkan biaya masuk, pada tahun 2016, jumlah total wisatawan menyusut dari 172.863 menjadi 151.673 pada 2017 tetapi total *income* naik menjadi lebih dari Rp 2.000.000.000 dari sebelumnya Rp 1.800.000.000 (Darmawan, 2019). Keuntungan yang didapatkan ini selain berkontribusi bagi masyarakat lokal juga mendukung upaya pelestarian alam dari kegiatan wisata.

Kebijakan pembatasan wisatawan juga bermanfaat bagi *recovery* alam itu sendiri. Artinya dengan mengurangi jumlah pengunjung, suatu destinasi alam dapat kembali berfungsi dan berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, *Yellow-eyed Penguin Reserve* sebuah kawasan konservasi penguin yang terletak di sebuah pulau di selatan New Zealand menurunkan jumlah pengunjung dari 90,000 per tahun menjadi 40,000 per tahun yang akhirnya berhasil menaikkan populasi penguin bermata kuning (*yellow-eyed*) dari 30 ekor menjadi 200 ekor (Buckley, 2003). Sementara itu, untuk akomodasi dengan setting alam juga seharusnya ada pembatasan jumlah tamu seperti yang dilakukan di Chalalan Ecolodge di Bolivia membatasi pengunjung hanya 24 orang per hari dan Green Island Resort di Australia mempunyai jumlah maksimum pengunjung 90 tamu (Buckley, 2003).

#### **KETERLIBATAN MASYARAKAT LOKAL**

Salah satu kriteria agar sebuah destinasi wisata berbasis alam disebut sebagai ekowisata adalah adanya partisipasi masyarakat lokal,

baik dalam perencanaan maupun operasional (Fennell, 2002). Hal yang kadang terjadi di lapangan adalah operator wisata menyebut bisnis wisata alam mereka sebagai ekowisata, namun pada kenyataannya masyarakat lokal tidak dilibatkan. Mereka hanya menjadi penonton atau bahkan objek wisata itu sendiri. Hal ini penulis alami sendiri ketika dulu tahun 2013 berkunjung ke salah satu operator ekowisata di Gunung Merapi Yogyakarta. Sang operator mematok harga \$ 400 untuk satu orang pengunjung di mana setiap trip menyusuri hutan di Gunung Merapi pengunjung dibatasi hanya 15 orang. Dari sekian keuntungan atau serangkaian trip ekowisata, sang operator sama sekali tidak menyebut masyarakat lokal dalam operasional maupun pembagian keuntungan. Tentunya hal ini perlu disikapi karena bagaimanapun juga masyarakat lokal berhak mendapatkan *direct benefit* atas kegiatan ekowisata di daerah mereka.

Ketidakikutsertaan masyarakat lokal ini selain tidak *fair*, juga rentan terhadap isu-isu penolakan dari masyarakat. Akibatnya, kegiatan ekowisata tidak *sustainable*. Makanya, dalam dokumen *Quebec Declaration on Ecotourism* (2002) disebutkan bahwa ekowisata dapat menjadi kegiatan wisata yang berkelanjutan ketika, salah satunya, melibatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam perencanaan, pengembangan, dan operasional dan berkontribusi untuk kesejahteraan mereka. Sebagaimana yang terjadi di Zambia, pemerintah akhirnya melibatkan masyarakat lokal dalam ekowisata dan menyediakan *community funds* akibat maraknya perburuan liar yang dilakukan masyarakat (Buckley, 2003). Bahkan secara eksplisit, Wondirad (2017) mengklaim bahwa di negara-negara berkembang di mana jumlah pekerjaan terbatas, kegagalan untuk melibatkan pemangku kepentingan ekowisata, terutama masyarakat lokal tidak hanya mempercepat matinya ekowisata tetapi juga membahayakan seluruh ekosistem. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang esensial dalam operasi sebuah ekowisata.

Kita dapat belajar dari kisah sukses ekowisata dalam melibatkan dan membagi keuntungan kepada masyarakat lokal. Berikut adalah contoh-contoh strategi yang diterapkan

dalam memberdayakan masyarakat lokal, yang penulis ambil dari buku *Case Studies in Ecotourism* yang ditulis oleh Buckley (2003):

1. Memperkerjakan masyarakat lokal (e.g. *guide*, administrasi, *driver*),
2. Memperkerjakan masyarakat dalam pembangunan fasilitas wisata (e.g. *guest house*)
3. Melibatkan masyarakat dalam program konservasi,
4. Menyewa tanah masyarakat dengan perjanjian pembagian keuntungan,
5. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dengan membuat mereka wadah organisasi tersendiri (*local protected-area boards*),
6. Menyediakan *community funds* untuk membangun fasilitas-fasilitas umum,
7. Memberikan pendidikan tentang lingkungan kepada masyarakat, dan lain-lain.

## KESIMPULAN

Setidaknya ada empat hal yang harus dipenuhi agar ekowisata dapat berkelanjutan (*sustainable ecotourism*), yaitu konservasi lingkungan, edukasi kepada pengunjung, partisipasi dan kesejahteraan masyarakat, serta dorongan bagi *independent travelers* maupun *organized tours* (*Quebec Declaration on Tourism*, 2002). Oleh karena itu, pembatasan pengunjung mutlak harus dilakukan. Pembatasan ini bertujuan untuk meminimalisir dampak pada lingkungan sehingga ekowisata dapat berkelanjutan. Selain pembatasan, hal tidak kalah penting adalah adanya pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi mereka dalam pengelolaan, operasi, dan monitoring, termasuk membagi keuntungan kepada mereka. Dua hal ini mendesak untuk disosialisasikan mengingat di Indonesia jamak dijumpai wisata alam yang menyebut diri mereka ekowisata tapi ternyata jauh dari prinsip-prinsip ekowisata itu sendiri.

Bagaimanapun juga, ketika suatu destinasi ekowisata menerapkan prinsip ekowisata maka diharapkan destinasi tersebut akan lestari (*sustainable*). Sebagai contoh, adanya pelibatan masyarakat lokal, dalam tahap perencanaan atau pelaksanaan akan membuat masyarakat merasa memiliki (*sense of belonging*) dan memperoleh

penghasilan dari destinasi tersebut. Sebagaimana klaim Goodwin (1996), ketika masyarakat merasa bahwa keberadaan ekowisata bermanfaat bagi mereka maka mereka akan menghargai dan melindungi kawasan alam tersebut.

Sebagai penutup, penulis ingin mengatakan bahwa potensi keuntungan ekonomi dari ekowisata sebenarnya tinggi walaupun secara kuantitas, jumlah pengunjung tidak terlalu banyak. Hal ini karena ekowisatawan (*ecotourist*) itu berbeda dengan wisatawan pada umumnya. Ekowisatawan memiliki karakteristik yang sebenarnya sangat berpotensi mendatangkan keuntungan finansial yang lebih. Hal ini karena mereka secara umum adalah wisatawan yang terpelajar (*well-educated*), kaya (*wealthy*), dan tinggalnya lama (*long-staying*) (Fennell, 2003). Itulah mengapa biasanya mereka bersedia membayar mahal untuk dapat mengunjungi dan menikmati sebuah destinasi ekowisata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Buckley, R. (2003). *Case Studies in Ecotourism*. Oxon, UK: CABI Publishing
- Damanik, J. and Weber, H.F. (2006). *Perencanaan Ekowisata Dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: PUSPAR UGM dan Andi.
- Darmawan, F. (Agustus 30, 2019). *Overtourism mengancam Indonesia: apa yang harus dilakukan?* Diakses pada 21 September 2019 dari <https://theconversation.com/overtourism-mengancam-indonesia-apa-yang-harus-dilakukan-122553>
- Ecotourism Society. (1993). *Ecotourism Guidelines for Nature Tour Operators, North Bennington*. VT: *The Ecotourism Society*.
- Fennell, D. A. (2002). *Ecotourism Programme Planning*. Wallingford, UK: CABI Publishing
- Fennell, D. A. (2003). *Ecotourism: An Introduction. 2nd Edition*. Routledge: London
- Goodwin, H. (1995). *Tourism and the environment. Biologist*, 42(3):129–133.
- Hetzer, N.D. (1965). *Environment, tourism, culture. LINKS* (July); reprinted in *Ecosphere* (1970) 1(2):1–3.

- International Year of Ecotourism*. (2002). *Quebec Declaration on Tourism*. Madrid: WTO
- Musadad, M. (2016). *Perceived Tourism Impacts In Pindul Cave, Yogyakarta, Indonesia*. *Journal of Business on Hospitality and Tourism*, 02(1), pp. 17-25
- Nelson, J.G. (1994). *The spread of ecotourism: some planning implications*. *Environmental Conservation*, 21(1), 248–255.
- Preece, N., van Oosterzee, P., and James, D. (1995). *Biodiversity Conservation and Ecotourism: An Investigation of Linkages, Mutual Benefits and Future Opportunities*, Canberra: Department of the Environment, Sport, and Territories.
- The International Ecotourism Society*. (January 7, 2015). *TIES Announces Ecotourism Principles Revision*. Diakses pada 20 September 2019 dari <https://ecotourism.org/news/ties-announces-ecotourism-principles-revision/>
- Thompson, P. (1995). *The errant e-word: putting ecotourism back on track*. *Explore*, 73:67–72
- Wondirad, A. (2017). *Who benefits from the ecotourism sector in Southern Ethiopia?*. *International Journal of Tourism Sciences*, 17(4), 276–297